



BUPATI BARITO SELATAN

Buntok, 21 Juni 2023

Kepada

Nomor : B. 180/BUP/SEKDA/AS.III-ORG/060/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Kabupaten Barito Selatan
di -
Tempat

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1069/RB.06/2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah 50,65 dengan kategori CC. untuk lebih jelas dengan ini disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

I. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun		
			2020	2021	2022
A. Komponen Pengungkit					
I.	Pemenuhan	20,00	7,34	7,50	8,01
II.	Hasil Antara area Perubahan	10,00	5,83	5,08	4,78
III.	Reform	30,00	7,24	7,68	8,70
Total Komponen Pengungkit		60,00	20,41	20,26	21,49
B. Komponen Hasil					
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,02	7,13	6,97
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,08	8,08	8,00
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,00	8,37	8,47
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,52	7,22	5,72
Total Komponen Hasil		40,00	29,62	30,80	29,16
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit dan Hasil)		100,00	50,03	51,06	50,65

II. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebanyak 8 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sektor* dengan hasil sebagai berikut :

Jalan Pelita Raya No. 305F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500
Website www.baritoselatankab.go.id, Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai			Sumber Data
			2020	2021	2022	
1.	ASN Profesional	0-100	49,10	63,27	33,66	BKPSDM
2.	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	-	2,28	2,37	Dinas Kominfo
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	70,00	59,63	67,80	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	2,12	2,36	Bagian Organisasi Setda
5.	Kapabilitas APIP	0-5	Level 2	2	2	Inspektorat Daerah
6.	Maturitas SPIP	0-5	Level 3	3	3	Inspektorat Daerah
7.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	88,92	65,52	67,45	Bagian Organisasi Setda
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	42,42	42,42	6,95	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Memperhatikan hal tersebut diatas, agar Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Barito Selatan menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Evaluator melalui Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksud, sebagai upaya meningkatkan kualitas implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan rencana aksi Reformasi Birokrasi baik Tim RB dan juga Perangkat Daerah untuk dapat mengawal implementasi *road map* dan *quick wins* secara berkelanjutan. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi RB dan juga menyusun rencana perbaikan rencana aksi apabila menghadapi hambatan.
2. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / sinkron / bersifat menghambat melalui penyusunan melalui penyusunan *regulatory impact analysis* (RIA).
3. Menyusun mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan kelompok Jabatan Fungsional sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
4. Melakukan kembali evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi saat ini.

5. Menyusun peta proses bisnis untuk Pemerintah Daerah serta seluruh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan mengacu pada kinerja organisasi. Selanjutnya berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun dijabarkan menjadi SOP untuk mendukung kinerja organisasi yang lebih baik.
6. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan Master Plan SPBE Nasional.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen SDM dengan melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
8. Memaksimalkan perbaikan perencanaan kinerja dalam akuntabilitas kinerja di setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah dan hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
10. Meningkatkan peran APIP pada lingkungan Perangkat Daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai melalui fungsi *quality assurance and consulting* bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
11. Meningkatkan dan menjaga kepatuhan terhadap pelaporan LHKASN dan LHKPN sebagai wujud transparansi dan penegakan integritas.

Demikian disampaikan, untuk ditindak lanjuti sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN